



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2023



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru

+62 761 33073 | www.bkd.riau.go.id | email: bkd@riau.go.id



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan serta penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4)
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

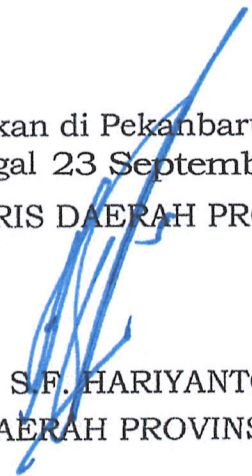
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR : 38

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau
Tahun 2020 dan Capaian Renstra
BKD Provinsi Riau 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah 23

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan 24

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau 26

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan
misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti
NSPK, SPM dan SDGs
(Sustainable Development Goals) 27

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 27

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan 27

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat 34

BAB	III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
	3.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia	36
	3.1.2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	37
	3.1.3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	38
	3.1.4. Komisi Aparatur Sipil Negara	39
	3.1.5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	40
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
	3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB	IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
BAB	V : PENUTUP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja SKPD 2

Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen RKD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Riau	8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	15
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Memasuki Masa Pensiun Menurut Jenis Kelamin	20
Tabel 2.8 Jumlah Kasus Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Yang Mengikuti Tugas Belajar Menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 2.11 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau Tahun 2020.....	25
Tabel 2.12 Indeks Kepuasan Pelayanan BKD Provinsi Riau Tahun 2020	25
Tabel 2.13 Pemetaan Permasalahan dan Hambatan	26
Tabel 2.14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Riau	22
Tabel 2.15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 BKD Provinsi Riau Tahun 2022	35
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022	42
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Riau	45
Tabel 4.1 Rumusan Rencana dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021	50

BAB I

PENDAHULUAN

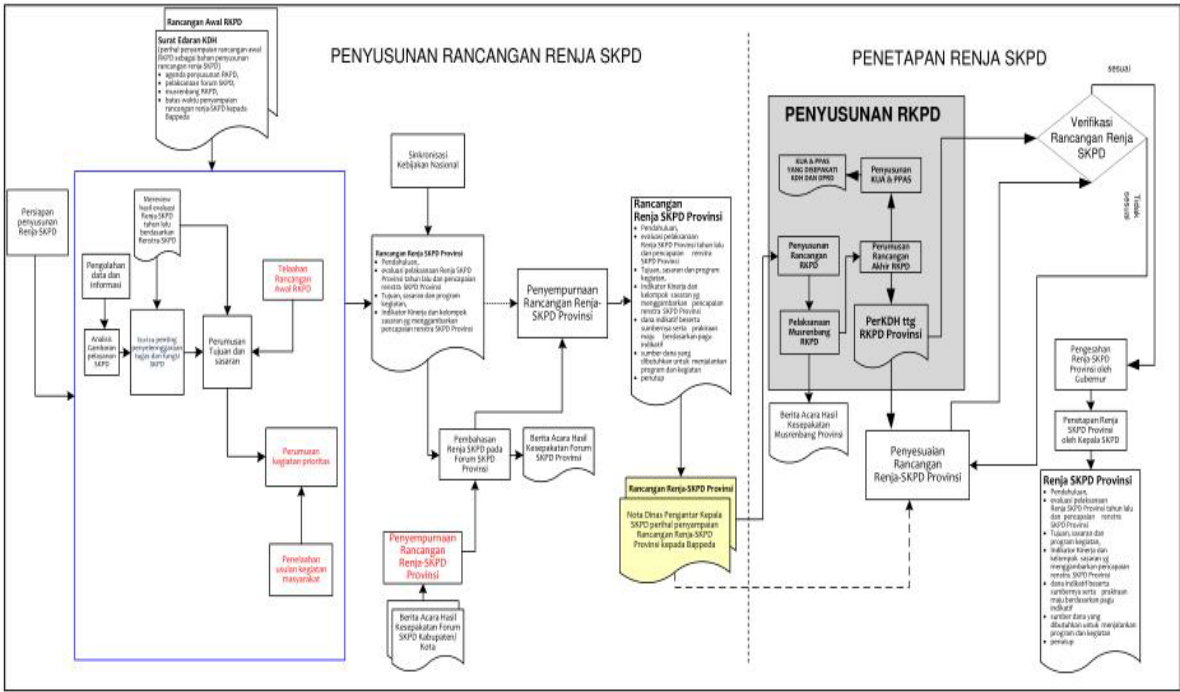
1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

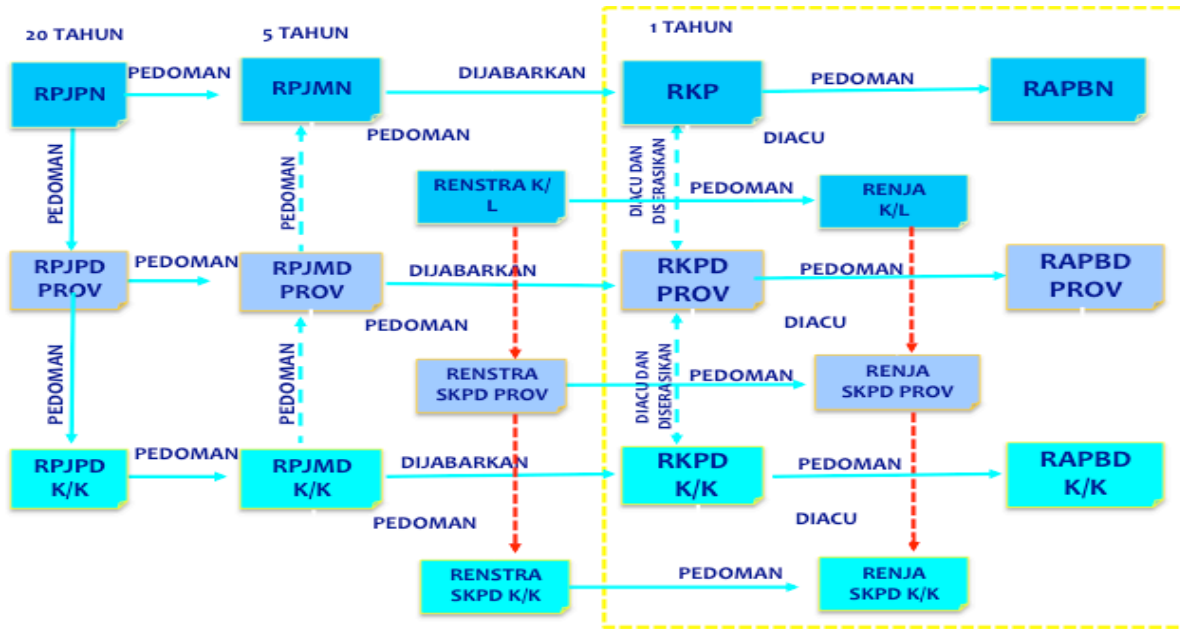
Renja Perangkat Daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
- 4) Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
- 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja SKPD



Gambar 1.2
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja



Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 telah mengamanatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan penunjang urusan yaitu kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

RPJMD sebagai perencanaan pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya, perencanaan perangkat daerah 5 tahunan sebagaimana terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih teknis dan operasional dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2022 menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam prosesnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah agar dapat dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Setelah melalui proses verifikasi, Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Riau Tahun 2023.

1.1. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 10) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
- 19) Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
- 20) Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 adalah :

- 1) Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2023
- 2) Sebagai instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan subbab sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subbab sebagai berikut.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2020 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang telah diterjemahkan ke dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau harus memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada realisasi APBD Tahun 2021 dan Tahun 2022, yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat capaian terhadap target tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan serta capaian realisasi anggaran pada masing – masing program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan rencana kerja juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 sampai dengan tahun berjalan (2022) disajikan dalam format T-C.29 pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN														
0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	12500	Surat	1000	Surat								1000	8,00%
0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	120	Rekening	24	Rekening								24	20,00%
0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	80	Unit	129	Unit								129	161,25%
0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	12	Bulan								12	20,00%
0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	70	Unit	14	Unit								14	20,00%
0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	120	Jenis	27	Jenis								27	22,50%
0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	175	Jenis	27	Jenis								27	15,43%
0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	155	Jenis	31	Jenis								31	20,00%
0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	32600	Porsi	6390	Porsi								6390	19,60%
0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	850	Kali	88	Kali								88	10,35%
0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	11100	OB	648	Orang Bulan								648	5,84%
0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	1380	OB	276	Orang Bulan								276	20,00%
0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														
0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	10	Ruang	0	Ruang								0	0,00%
0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1500	Unit	300	Unit								300	20,00%
3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA														
3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah dokumen	7	Dokumen	1	Dokumen								1	14,29%
3.0.03.15.002.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang terkelola secara update	12500	Data Elektronik	2500	Data Elektronik								2500	20,00%
3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut	1750	Orang	350	Orang								350	20,00%
3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	630	Orang	103	Orang								103	16,35%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan	5	Dokumen	1	Dokumen							1	20,00%
3.0.03.15.008.	Pengelolaan Penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	504	Dokumen	1	Dokumen							1	0,20%
3.0.03.15.009.	Penyusunan Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi	Jumlah dokumen analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi yang tersusun	5	Dokumen	1	Dokumen							1	20,00%
3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	6	Modul	2	Modul							2	33,33%
3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	5	Modul	1	Modul							1	20,00%
3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya	1750	Orang	250	Orang							250	14,29%
3.0.03.15.017.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota Se-Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola	20000	Berkas	4000	Berkas							4000	20,00%
3.0.03.15.018.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi	30000	Orang	560	Orang							560	1,87%
3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	5000	Orang	1000	Orang							1000	20,00%
3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	1795	Dokumen	359	Dokumen							359	20,00%
3.0.03.15.021.	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	350	Kasus	40	Kasus							40	11,43%
3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR													
3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen							2	20,00%
3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	5	Dokumen	1	Dokumen							1	20,00%
3.0.03.17.005.	Pemberian Beasiswa Tugas Belajar	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	282	Orang	22	Orang							22	7,80%
3.0.03.17.008.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengiktui diklat fungsional	164	Orang	6	Orang							6	3,66%
3.0.03.17.009.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	190	Orang	20	Orang							20	10,53%
3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor	100	Orang	18	Orang							18	18,00%
3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	60	Kali	4	Kali							4	6,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.17.015.	Pembangunan Database Terkait Pelanggaran Disiplin, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah database yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku	1	Data Base	1	Database						1	100,00%
EVALUASI RENJA BERDASARKAN PERUBAHAN NOMENKLATUR PADA PERMENDAGRI NO. 90/2019													
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran					100	Persen	100	Persen	100%	100	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah					100	Persen	100	Persen	100%		
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN					116	Orang	116	Orang	100%	114	Orang
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah					100	Persen	100	Persen	100%		
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang					21	Jenis	21	Jenis	100%	23	Jenis
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan					26	Jenis	26	Jenis	100%	69	Unit
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					15	Unit	15	Unit	100%	6	Jenis
5.03.01.1.06.04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan					7315	Porsi	7315	Porsi	100%	9983	Porsi
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan					44	Jenis	44	Jenis	100%	39	Jenis
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					137	Kali	137	Kali	100%	65	Kali
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					100	Persen	100	Persen	100%		
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim					2500	Surat	2500	Surat	100%	16	Surat
5.03.01.1.08.02	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar					36	Rekening	36	Rekening	100%	3	Rekening
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor					12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					326	Unit	326	Unit	100%		
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara					14	Unit	14	Unit	100%	14	Unit
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					311	Unit	311	Unit	100%	145	Unit
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara					1	Ruang	1	Ruang	100%	2	Ruangan
5.03.02.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan					100	Persen		Persen	0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					100	Persen		Persen	0%				
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Data Kepegawaian yang terselesaikan					100	Persen	100	Persen	100%				
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan/formasi ASN					1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang direkrut					350	Orang	353	Orang	100,86%	350	Orang	703	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang difasilitasi					600	Orang	761	Orang	126,83%	600	Orang	1361	
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga ProfesiASN	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI					2	Agenda	2	Agenda	100%	3	Agenda	5	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola					1	Sistem	1	Sistem	100%	1	Modul	2	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya					350	Orang	350	Orang	100%	2500	Data elektronik	2850	
		Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update					2500	Data Elektronik	2500	Data Elektronik	100%	350	Orang	2850	
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasidan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola					1	Modul	1	Modul	100%	1	Modul	2	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN					100	Persen	100	Persen	100%				
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas					1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas kenaikan pangkat dan penggunaan gelar ASN yang dikelola					4000	Berkas	4490	Berkas	112,25%	4000	Berkas	8490	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi					1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase perumusan kebijakan serta fasilitasi pengembangan kompetensi ASN					100	Persen	142,296	Persen	142%				
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi					1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	
		Jumlah dokumen pemetaan, evaluasi dan talent pool					2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	
		Jumlah dokumen Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan					1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	
		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor					20	Orang	20	Orang	100%	20	Orang	40	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d 2024)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5.03.02.1.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi ASN melalui admistrasi diklat dan sertifikasi					1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Modul	1	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah					145	Orang	282	Orang	194,48%			282	
		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Tugas Belajar					14	Orang	14	Orang	100%	18	Orang	32	
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi					123	Orang	123	Orang	100%	126	Orang	249	
		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis					8	Orang	10	Orang	125,00%	4	Orang	14	
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. I					1	Orang	1	Orang	100%	1	Orang	2	
		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II					5	Orang	5	Orang	100%	6	Orang	11	
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional					8	Orang	9	Orang	112,50%	40	Orang	49	
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT					2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	4	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang terselesaikan					100	Persen	100	Persen	100%				
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN					2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	4	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan					16	Orang	17	Orang	106,25%	22	Orang	39	
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya					600	Orang	1020	Orang	170,00%	1000	Orang	2020	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang memperoleh pembinaan konseling					15	Orang	15	Orang	100%	28	Orang	43	
		Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN					12	Kali	12	Kali	100%	12	Kali	24	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus kepegawaian yang ditangani					70	Kasus	57	Kasus	81%	70	Kasus	127	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan
- b. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan
- c. Koordinasi yang baik antar stakeholder baik internal maupun eksternal BKD.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pula terdapat 8 (delapan) sub-kegiatan yang melebihi target yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN dengan persentase 100,86% ;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan persentase 126,83% ;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan persentase 112,25%;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan persentase 194,48% ;
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan persentase 125,00% ;
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN dengan persentase 112,50%;
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai dengan persentase 106,25 ;
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai dengan persentase 170,00%.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan akibat wabah COVID-19;
- b. Adanya kegiatan yang tidak dijalankan karena kebijakan daerah;
- c. Adanya perubahan target kinerja terhadap kegiatan.
- d. Hal-hal lain yang bersifat tentatif dan tak dapat diprediksi

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah;
- d. Penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki tujuan yaitu meningkatkan profesionalitas ASN dengan sasaran peningkatan manajemen pelayanan administrasi ASN serta pembinaan dan pengembangan ASN. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Indeks Profesionalitas ASN
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian; dan
- c. Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik;

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melalui capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disajikan dalam format T-C.30 pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKD Provinsi Riau				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Riau			45	50	55	60	50,09	52,40	55	60	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			65 (B)	66 (B)	67 (B)	67 (B)	77,37 (B)	83,93 (B)	79,00 (B)	80 (B)	
3	Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik			70 %	75 %	80 %	82 %	99,00 %	99,66 %	99,00 %	99,00 %	
4	Indeks Sistem Merit			236.60 %	246.60 %	255.91 %	266.14 %	293.5 %	297.5 %			

Catatan :
 Kriteria Nilai Indeks Profesionalitas ASN
 91-100 Sangat Tinggi
 81-90 Tinggi
 71-80 Sedang
 61-70 Rendah
 ≤60 Sangat Rendah

Kriteria Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
 88,31-100 Sangat Baik
 76,61-88,30 Baik
 65,00-76,60 Kurang Baik
 25,00-64,99 Tidak Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama ini mengacu pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dimana tidak terdapat Indikator NSPK, SPM Nasional maupun IKK tertentu.

Sehubungan dengan telah selesainya proses perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang diikuti dengan perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama yang menjadi alat ukur capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk 2 (dua) tahun tersisa yakni 2023 dan 2024 tertuang dalam Bab 3 Tabel 3.1 dokumen ini.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dapat diketahui bahwa terdapat beberapa instruksi presiden, antara lain : melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

Dalam memproyeksikan Rencana Kerja BKD Provinsi Riau Tahun 2023 agar tercapainya sasaran pembangunan SDM serta agar seluruh program dan kegiatan di bidang kepegawaian dapat dirasakan oleh seluruh ASN Provinsi Riau, maka sangat diperlukan adanya pengarusutamaan gender sebagai salah satu pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran BKD Provinsi Riau. Berikut disajikan data terpilah gender BKD Provinsi Riau tahun 2021 yang mengakomodir isu-isu gender di Provinsi Riau :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dinas/Instansi Pemerintahan Government Agencies	2021		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	286	185	471
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	122	76	198
3	Inspektorat Daerah	85	65	150
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	116	86	202
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	64	62	126
6	Badan Pendapatan Daerah	254	177	431
7	Badan Kepegawaian Daerah	56	56	112
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70	32	102
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46	9	55
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45	23	68

No	Dinas/Instansi Pemerintahan Government Agencies	2021		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5
11	Dinas Pendidikan	2.700	5.054	7.754
12	Dinas Kesehatan	74	209	283
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	389	131	520
14	Dinas Sosial	97	57	154
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	106	53	159
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14	75	89
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	50	48	98
18	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	174	120	294
19	Dinas Perkebunan	63	35	98
20	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	564	180	744
21	Dinas Perhubungan	89	38	127
22	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	57	38	95
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah	119	95	214
24	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53	59	112
25	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	66	27	93
26	Dinas Kebudayaan	44	36	80
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	49	61	110
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan	71	61	132
29	Dinas Pariwisata	53	59	112
30	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	42	48	90
31	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	141	45	186
32	Badan Penghubung	24	39	63
33	Satuan Polisi Pamong Praja	167	22	189
34	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	217	627	844
35	Rumah Sakit Jiwa Tampan	69	173	242
36	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	43	149	192
Total		6.679	8.310	14.989

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah PNS Provinsi Riau dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan dengan selisih 1.631 orang, dimana laki-laki sebanyak 6.679 orang dan perempuan sebanyak 8.310 orang. Angka 8.310 memiliki makna yang sangat besar, dengan pengertian bahwa semakin banyaknya jumlah PNS perempuan di Provinsi Riau menggambarkan semakin tingginya peran serta perempuan dalam kancah pengelolaan negara dan pembangunan. Kesetaraan gender ini akan tetap dipertahankan mengingat daya saing sebuah negara sudah tidak lagi melihat jenis kelamin melainkan lebih pada kualitas SDM.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan Terakhir	2021		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5
1	Sampai dengan SD	34	4	38
2	SLTP/Sederajat	37	5	42
3	SMA/Sederajat	1.243	680	1.923
4	Diploma I,II/Akta I,II	32	25	57
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	414	758	1.172
6	Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	4.919	6.838	11.757
Total		6.679	8.310	14.989

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pada seluruh PNS di Provinsi Riau sangat bervariasi. Untuk pendidikan terakhir SD, SLTP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I,II/Akta I,II lebih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 34 dan 37 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan terakhir Diploma III/Akta III/Sarjana Muda, dan Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D sudah didominasi oleh PNS dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini secara garis besar menunjukkan bahwa PNS di Pemerintah Provinsi Riau yang berjenis kelamin perempuan lebih memiliki kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Kepangkatan <i>Hierarchy</i>	2021		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5
1	I/A (Juru Muda)	2		2
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	4	1	5
3	I/C (Juru)	9	2	11
4	I/D (Juru Tingkat I)	26	2	28

No	Golongan Kepangkatan <i>Hierarchy</i>	2021		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4	5
	Golongan I/Range I	41	5	46
5	II/A (Pengatur Muda)	50	18	68
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	158	80	238
7	II/C (Pengatur)	329	191	520
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	493	213	706
	Golongan II/Range II	1.030	502	1.532
9	III/A (Penata Muda)	412	616	1.028
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	1.081	1.172	2.253
11	III/C (Penata)	968	1.535	2.503
12	III/D (Penata Tingkat I)	1.344	2.043	3.387
	Golongan III/Range III	3.805	5.366	9.171
13	IV/A (Pembina Muda)	980	1.310	2.290
14	IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	685	1.054	1.739
15	IV/C (Pembina)	82	59	141
16	IV/D (Pembina Tingkat I)	47	11	58
17	IV/E (Pembina Utama)	9	3	12
	Golongan IV/Range IV	1.803	2.437	4.240
	Jumlah/Total	6.679	8.310	14.989

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 seluruh kategori kepangkatan PNS dipenuhi oleh PNS Provinsi Riau. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdian nya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya. Untuk pnas dengan kategori golongan I dan golongan II masih didominasi oleh laki-laki. Namun untuk golongan III dan golongan IV didominasi jumlahnya oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata PNS perempuan di provinsi riau lebih banyak mendapatkan penghargaan dibandingkan dengan pns laki-laki.

Tabel 2.6.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	2021		
		Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1	2	3	4	5
1	Fungsional Tertentu <i>Specific Functional</i>	2.871	5.376	8.247
2	Fungsional Umum/Staf <i>General Functional</i>	2.992	2.561	5.553
3	Struktural/ <i>Structural</i>	816	373	1.189
	Eselon V/ <i>5th Echelon</i>			
	Eselon IV/ <i>4th Echelon</i>	561	279	840
	Eselon III/ <i>3rd Echelon</i>	213	87	300
	Eselon II/ <i>2nd Echelon</i>	41	7	48
	Eselon I/ <i>1st Echelon</i>	1		1
Jumlah/Total		6.679	8.310	14.989

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah PNS perempuan di pemerintah provinsi riau sudah mendapatkan perannya secara signifikan dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan struktural. Hal ini dapat dilihat pada jumlah banyaknya PNS perempuan yang menduduki fungsional tertentu yaitu 5.376 orang dibandingkan dengan PNS laki-laki yaitu 2.871 orang. Selain itu untuk jabatan struktural memang masih didominasi oleh laki-laki. Namun hal tersebut sudah menggambarkan bahwa PNS perempuan juga bisa ikut bersaing dalam jabatan struktural.

Tabel 2.7.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Memasuki Masa Pensiun Menurut Jenis Kelamin

No	Data Pensiun	Tahun 2021		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Reguler			
2	Meninggal			
3	Dini			
Total		454	333	787

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Batas usia pensiun atau minimal usia kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum adalah 53 tahun dan maksimal 65 tahun. Hal terebut telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa batas usia PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut masih bergantung pada masing-masing jabatan. Sesuai dengan

Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tentang Batas Usia Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional (JF) pensiun dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain : usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, usia 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama, PNS yang berusia di atas 60 tahun dan menduduki JF ahli madya sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 65 tahun, serta PNS yang berusia di atas 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021 sebanyak 787 orang, dimana laki-laki sebanyak 454 orang dan perempuan 333 orang. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa untuk laki-laki yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2.8.
Jumlah Kasus Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil
Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin

No	Kasus Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik	Tahun 2021		
		laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Berat	11	5	16
2	Sedang	-	-	-
3	Ringan	-	-	-
Total		11	5	16

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diketahui bahwa PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan, apabila melanggar peraturan akan dijatuhi hukuman dengan beberapa tingkatan hukuman disiplin, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran PNS Provinsi Riau hanya berada pada jenis hukuman disiplin berat dan lebih didominasi oleh PNS laki-laki. Hal ini dilihat pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh PNS laki-laki berjumlah 11 orang dan PNS perempuan berjumlah 5 orang.

Tabel 2.9.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Yang Mengikuti Tugas Belajar Menurut Jenis Kelamin

No	Program			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	S2 Umum			
	Magister Psikologi Profesi		1	1
2	Spesialis			
	PPDS Kedokteran Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler	1		1
	PPDS Gizi dan Klinik		1	1
	PPDS Ilmu Penyakit Dalam	1		1
	PPDS Anestesiologi dan Reanimasi	1		1
	PPDS Program Studi Dermatologi dan Venereologi		1	1
Jumlah		3	3	6

No	Program			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
3	S3 Umum			
	DOKTOR Ilmu Lingkungan	1		1
	DOKTOR Perencanaan Wilayah dan Kota	1		1
	DOKTOR Studi Ilmu Ekonomi Pertanian	1		1
	DOKTOR Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan		1	1
	DOKTOR Ilmu Administrasi Publik	1		1
	DOKTOR Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	2		2
4	Spesialis			
	Sub Spesialis Kardiologi Anak		1	1
	Ilmu Kedokteran		1	1
	Jumlah	6	3	9
	Total	9	6	15

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar masih didominasi oleh PNS laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah PNS laki-laki yang mengikuti sebanyak 9 orang sedangkan jumlah PNS perempuan yang mengikuti tugas belajar sebanyak 6 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengikuti tugas belajar , semua PNS mempunyai hak yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak adanya diskriminasi hak tugas belajar bagi perempuan dan laki-laki di pemerintah provinsi riau, sehingga diharapkan kedepannya SDM ASN di Pemerintah Provinsi Riau lebih berkualitas dan dapat dibanggakan di kancah nasional dan internasional.

Tabel 2.10.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kompetensi	Tahun 2021		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional I	1		1
2	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	4	1	5
3	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	5	2	7
4	Fasilitasi Diklat Teknis			
	Manajerial	4	1	5
	Fungsional Tertentu	3	1	4
	Fungsional Umum		1	1
	Total	17	6	23

Sumber data : BKD Provinsi Riau 2021

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sebanyak 23 orang dengan rincian PNS laki-laki 17 orang dan PNS perempuan sebanyak 6 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua PNS diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lain-lain yang

secara langsung dapat meningkatkan kompetensinya. Namun dalam hal ini untuk pengembangan kompetensi PNS di Provinsi Riau pada tahun 2021 masih didominasi dan diminati oleh PNS laki-laki.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tercermin dalam upaya pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Tingkat profesionalitas ASN dipengaruhi oleh beberapa dimensi, yaitu:

- a. Kompetensi (Dimensi yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan). Bobot dimensi ini sebesar 40%.
- b. Kualifikasi Pendidikan (Dimensi ini digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah). Bobot dimensi ini sebesar 25%.
- c. Disiplin (Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS). Bobot dimensi ini sebesar 5%.
- d. Kinerja (Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS). Bobot dimensi ini sebesar 30%.

Adapun capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 adalah 52,40. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 50.

2) Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Untuk mendukung visi dan misi Gubernur Riau, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki tujuan mewujudkan Profesionalisme ASN dengan salah satu sasarannya yaitu meningkatkan manajemen pelayanan. Adapun indikator kinerja dari sasaran tersebut diukur dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dapat diperoleh dengan melakukan *survey kepuasan pelayanan* secara berkala berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Demikian juga halnya dalam pemberian pelayanan publik kepada ASN, BKD Provinsi Riau selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan kepada ASN selaku pengguna jasa pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan BKD Provinsi Riau adalah dengan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan Aparatur Sipil Negara terhadap kualitas pelayanan kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melalui survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian dengan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Adapun Unsur pelayanan yang merupakan faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada ASN sebagai variabel penyusunan Survey kepuasan pelayanan kepegawaian terdiri dari persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Adapun capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 adalah 83,93 dengan kategori Baik. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 66.

3) Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik

BKD Provinsi Riau juga memiliki sasaran yang lain dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pembinaan dan pengembangan ASN dengan indikator kinerjanya Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik. Formulasi yang digunakan untuk mengukur persentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik yaitu jumlah PNS Provinsi Riau yang berkinerja baik dibagi dengan jumlah seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Riau sehingga memiliki nilai capaian indikator kinerja pada tahun 2021 sejumlah 99,66 %.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan pada Tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu:

- a. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau;
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
- c. Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik.

Upaya pencapaian indikator kinerja dimaksud didukung oleh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Berikut disampaikan beberapa penjelasan terkait masing-masing indikator kinerja berdasarkan hasil pencapaian kinerjanya pada tahun 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJASN BKN pada Tahun 2021, penilaian Indeks Profesionalitas ASN untuk Provinsi Riau masih 52,61 dan tergolong sangat rendah karena termasuk dalam rentang nilai 60 ke bawah. Penggolongan ataupun kategori tersebut telah diatur di dalam Perka BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pencapaian bobot Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BKD Provinsi Riau terhadap 4 komponen pengukuran yaitu kompetensi, kualifikasi pendidikan, disiplin dan kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11.
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau Tahun 2021

No	Jumlah PNS	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	14.247	14.2	8.43	24.53	5	52.16

Sumber : DJASN, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa unsur yang paling rendah nilainya berada pada dimensi kompetensi, yaitu sebesar 8,43. Sedangkan sesuai dengan Perka BKN No. 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk unsur kompetensi pada Penilaian Indeks Profesionalitas ASN memiliki bobot pengukuran sebesar 40%. Dari data di atas terlihat jelas bahwa unsur kompetensi pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau masih di bawah bobot yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Hal ini mengakibatkan beberapa agenda diklat batal dilaksanakan baik oleh Pemerintah Provinsi Riau sendiri maupun diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Selain itu, pandemi *Covid-19* juga berdampak pada kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang mengakibatkan beberapa agenda diklat tidak terlaksana.

Sementara itu, untuk Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian melalui hasil pengukuran terhadap Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian BKD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12.
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
BKD Provinsi Riau Tahun 2021

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG
1	2	3
1.	Persyaratan	0,33
2.	Prosedur	0,33
3.	Waktu Pelayanan	0,30
4.	Biaya/Tarif	0,44
5.	Produk Pelayanan	0,34
6.	Kompetensi Pelaksana	0,33
7.	Perilaku Pelaksana	0,35
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0,32
9.	Sarana dan Prasarana	0,33

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa, dari 9 unsur pelayanan secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 3,09, Indeks kepuasan pelayanan 77,37, dan mutu pelayanan Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, BKD Provinsi Riau memiliki pelayanan yang prima terhadap pegawai pemerintah Provinsi Riau yang ditunjukkan melalui capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian sebesar 83,93 (B).

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Dalam upaya mencapai target kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hal ini tentu akan berdampak pada upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu untuk mengelola tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat pada 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.13.
Pemetaan Permasalahan dan Hambatan

No	Indikator Kinerja Utama	Permasalahan	Hambatan
1	2	3	4
1.	Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau	1. Kurangnya kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Riau 2. Belum efektifnya manajemen kualifikasi pendidikan ASN 3. Tingkat kedisiplinan pegawai yang rendah	1. Belum efektifnya upaya peningkatan kompetensi 2. Belum efektifnya pelaksanaan diklat 1. Belum adanya tuntutan peningkatan jenjang pendidikan 2. Belum sesuai antara penempatan dan kualifikasi pendidikan 1. Kurangnya penegakkan disiplin, kode etik dan perilaku ASN
2.	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Masih rendahnya nilai waktu pelayanan	Proses pelayanan yang lama dan tidak tepat waktu
3.	Persentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik	Belum seluruh ASN berkinerja baik	Kurangnya pembinaan terhadap ASN

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2021

Sekalipun adanya permasalahan dan hambatan yang dialami terkait pelaksanaan proses pencapaian target kinerja BKD Provinsi Riau, namun dalam hal ini seluruh target kinerja telah tercapai dengan maksimal sebagaimana data yang telah ditampilkan pada tabel T.C.30 di atas.

Uraian Pemetaan Permasalahan dan Hambatan sebagaimana dikemukakan di atas masih sangat relevan dan masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh BKD Provinsi Riau dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah tidak tercapainya Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan dengan indikator sasaran: Indeks reformasi birokrasi
2. Meningkatnya penerapan *e-government* dengan indikator sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Peluang yang diharapkan dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum maksimal;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Kerjasama dengan lembaga lainnya dalam pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
4. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (*e-government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah:

1. Implementasi Sistem Merit;
2. Pengadaan PNS untuk pemenuhan kebutuhan formasi;
3. Pengembangan Karier;
4. Penataan Gaji dan Perlindungan;
5. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Pengembangan Kelembagaan;
7. Penataan Pegawai sesuai dengan kompetensinya

Peluang dan tantangan sebagaimana dikemukakan di atas masih sangat relevan dan masih menjadi isu strategis yang dihadapi oleh BKD Provinsi Riau dalam rangka pencapaian target kinerja di tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Beberapa isu-isu penting yang dapat direkomendasikan sebagai catatan strategis sebelum dirumuskannya program dan kegiatan prioritas untuk tahun 2023 adalah :

1. Masih belum optimalnya waktu pelayanan terhadap ASN
2. Kurangnya kompetensi ASN
3. Belum seluruh ASN berkinerja baik

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas,

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merumuskan beberapa program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahunan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara; dan
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur.

Program-program tersebut didukung oleh serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja organisasi dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Adapun kondisi yang ditemukan pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2023 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Antara Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan tidak terdapat usulan kegiatan baru;
- b. Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada tiap – tiap kegiatan sebagaimana terdapat pada Rancangan Awal RKPD belum sesuai dengan analisis kebutuhan perangkat daerah;
- c. Beberapa kegiatan pada Rancangan Awal RKPD masih memiliki target terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang diberikan sehingga dapat diperkirakan tidak akan tercapai dengan pagu dimaksud;
- d. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap target beberapa kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD untuk mengakomodir kebutuhan pencapaian beberapa agenda strategis seperti Fasilitasi Tugas Belajar PNS, Seleksi CPNS dan PPPK, Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Pemetaan Jabatan/Talent Pool, dan lain-lain.

Selain beberapa hal yang dikemukakan di atas, BKD Provinsi Riau perlu melakukan pemetaan kembali terhadap rumusan nomenklatur Program dan Kegiatan pada Tahun 2023 untuk dilakukan sinkronisasi terhadap dokumen RKPD Provinsi Riau Tahun 2023. Hal ini dikarenakan rumusan program yang ada dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang selanjutnya diturunkan ke dalam RKPD Tahun 2023 masih menggunakan nomenklatur lama sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan BKD Provinsi Riau Tahun 2022 selengkapnya dikemukakan pada tabel 2.14. di bawah ini.

Tabel 2.14.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Riau

No.				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	22.939.696.164	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	24.133.503.643	
03	1	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	18.190.392.735	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	19.338.476.126	
03	1	102	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1392 Orang/ Bulan	18.190.392.735	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1392 Orang/ Bulan	19.338.476.126	Usulan Pagu: 19.338.476.126 Mempertimbangkan penyesuaian tunjangan fungsional pejabat hasil penyetaraan, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang fungsional, TPP PNS Pindahan, dll..
03	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Layanan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Layanan	-	
03	1	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	
03	1	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Jenis Layanan	1.529.682.429	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Jenis Layanan	1.529.682.429,00	
03	1	106	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.049.155	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.049.155,00	
03	1	106	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	267.449.129	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	267.449.129,00	
03	1	106	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.200.000,00	
03	1	106	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	184.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	184.000.000,00	
03	1	106	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	127.632.145	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	127.632.145,00	
03	1	106	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	706.352.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	706.352.000,00	

No.				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	2.909.140.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	2.954.864.088	
03	1	108	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	
03	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	785.140.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	785.140.000	
03	1	108	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	77.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	77.600.000	
03	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.042.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.088.124.088	
03	1	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis	310.481.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4 Jenis	310.481.000	
03	1	109	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.730.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.730.000	
03	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	104.520.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	104.520.000	
03	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	109.330.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	109.330.000	
03	1	109	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.901.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	54.901.000	
03	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	8.998.362.771	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	12.662.561.019	
03	2	101		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan	100 Persen	1.747.731.316	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan	100 Persen	2.195.016.088	
03	2	101	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	62.915.851	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	62.915.851	

No.				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03	2	101	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	807.324.600	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	807.324.600	
03	2	101	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	225.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	225.000.000	
03	2	101	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	124.999.600	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	572.284.372	Untuk mengakomodir pengiriman peserta MTQ Nasional KORPRI dan PORNAS KORPRI adalah sebesar 572.284.372
03	2	101	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	94.991.325	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	94.991.325	
03	2	101	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	249.999.970	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	249.999.970	
03	2	101	11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	42.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	42.500.000	
03	2	101	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	139.999.970	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	139.999.970	
03	2	102		Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	100 Persen	1.141.752.118	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	100 Persen	1.141.752.118	
03	2	102	1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	338.271.580	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	338.271.580	
03	2	102	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	459.575.920	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	459.575.920	
03	2	102	3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	343.904.618	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	343.904.618	
03	2	103		Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	5.448.060.117	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	100 Persen	8.664.973.594	
03	2	103	2	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	693.149.015	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	693.149.015	
03	2	103	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	128.519.540	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	128.519.540	

No.				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	2	103	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	2.230.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	3.051.421.485	Kebutuhan untuk mengakomodir kebijakan pemberian tugas belajar adalah 3,051,421,485, yaitu: - S2 umum 2 orang - Spesialis 3 orang - S3 Umum 1 orang - Subspesialis 1 orang
03	2	103	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	767.528.542	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.167.528.542	Untuk mengakomodir peningkatan kompetensi teknis pegawai, terutama APIP Inspektorat dalam rangka peningkatan kematangan/maturitas SPIP Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 1.167.528.542 (Tambahan Rp. 400.000.000)
03	2	103	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	6 Orang	450.863.020	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	6 Orang	1.331.286.563	Sampai dengan Tahun 2022, terdapat 18 JPT Pratama yang belum Diklat PIM II dan 1 JPT Madya yang belum Diklat PIM I. Kebutuhan untuk fasilitasi Diklatpim II untuk setidaknya 6 orang JPT adalah 908,925,429 sedangkan untuk 10 orang adalah 1,331,286,563
03	2	103	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40 Orang	830.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40 Orang	1.945.068.449	Kebutuhan untuk fasilitasi Diklat Fungsional sesuai target 40 orang adalah 1,945,068,449
03	2	103	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	348.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	348.000.000	
03	2	104		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselenggarakan	100 Persen	660.819.220	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Terselenggarakan	100 Persen	660.819.220	
03	2	104	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	98.499.945	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	98.499.945	
03	2	104	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	103.379.582	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	103.379.582	
03	2	104	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000 Orang	102.486.115	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000 Orang	102.486.115	

No.				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	2	104	7	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	236.808.224	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	236.808.223	
03	2	104	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	119.645.354	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	119.645.355	
JUMLAH								31.938.058.935	JUMLAH				36.796.064.662	

Berdasarkan tabel Review Terhadap Ranwal RKPD diatas dapat dilihat bahwa pagu BKD Provinsi Riau Pada Tahun 2023 yang tertera pada Ranwal RKPD tidak sesuai dengan kebutuhan BKD Provinsi Riau Pada Tahun 2023 yang dapat dilihat pada hasil analisa kebutuhan Bkd Provinsi Riau. Adapun beberapa analisa yang menjadi pertimbangan terhadap kebutuhan pagu BKD Provinsi Riau pada Tahun 2023 adalah :

1. Usulan Pagu: 19.338.476.126 Mempertimbangkan penyesuaian tunjangan fungsional pejabat hasil penyetaraan, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang fungsional, TPP PNS Pindahan,dll..
2. Untuk mengakomodir pengiriman peserta MTQ Nasional KORPRI dan PORNAS KORPRI adalah sebesar 572,284,372
3. Kebutuhan untuk mengakomodir kebijakan pemberian tugas belajar adalah 3,051,421,485, yaitu:
 - S2 umum 2 orang
 - Spesialis 3 orang
 - S3 Umum 1 orang
 - Subspesialis 1 orang
4. Untuk mengakomodir peningkatan kompetensi teknis pegawai, terutama APIP Inspektorat dalam rangka peningkatan kematangan/maturitas SPIP Provinsi Riau adalah sebesar Rp. 1.167.528.542 (Tambahan Rp. 400.000.000)
5. Sampai dengan Tahun 2022, terdapat 18 JPT Pratama yang belum Diklat PIM II dan 1 JPT Madya yang belum Diklat PIM I. Kebutuhan untuk fasilitasi Diklatpim II untuk setidaknya 6 orang JPT adalah 908,925,429 sedangkan untuk 10 orang adalah 1,331,286,563
6. Kebutuhan untuk fasilitasi Diklat Fungsional sesuai target 40 orang adalah 1,945,068,449

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengacu pada tugas pokok dan fungsi yaitu terkait administrasi kepegawaian, pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja bagi Aparatut Sipil Negara. Sehingga berdasarkan dengan hal tersebut, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.15
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
BKD Provinsi Riau Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang termasuk di dalamnya dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, wajib memperhatikan kebijakan – kebijakan di tingkat pusat terutama dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan urusan administrasi dan pengembangan kompetensi kepegawaian. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau meliputi 5 (lima) Kementerian/ Lembaga yaitu Kemepan - RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.1.1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki visi ***“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”***, didukung oleh 9 Misi, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian PANRB sebagai kementerian yang membidangi tentang pendayagunaan aparatur negara, berperan sebagai *prime mover* dalam mendorong profesionalisme dan integritas dari aparatur negaranya agar mencapai pemerintahan yang berkelas dunia.

Dalam mewujudkan Kementerian PANRB sebagai institusi pemerintahan yang berkelas dunia, Kementerian PANRB melakukan pembenahan birokrasi internal, menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping berbasis elektronik. Membangun SDM, mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah, menciptakan sistem pengawasan, mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Kementerian PANRB menetapkan nilai-nilai yang menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian PANRB, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap, yaitu:

- 1) Integritas
- 2) Profesional
- 3) Akuntabel
- 4) Melayani
- 5) Inovatif
- 6) Kesempurnaan (Komitmen pada Kualitas)

Beberapa program strategis Kementerian PAN-RB yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
- 2) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Beberapa hal yang dikemukakan di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

3.1.2 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Kebijakan strategis BKD termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020- 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama 2020-2024.

Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"***. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- 1) Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
- 2) Penyelenggaraan manajemen ASN,
- 3) Penyimpanan informasi pegawai ASN,
- 4) Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
- 5) Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Menjabarkan misi pembangunan Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.

- 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis.
- 3) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit.
- 4) Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.

Beberapa program strategis BKN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola (Co-Program bersama LAN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

Gambaran kebijakan strategis BKN tahun 2020-2024 di atas memberikan arah dalam dalam penyusunan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan.

3.1.3 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

LAN menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai kebijakan dalam menindaklanjuti isu-isu strategis dan diarahkan pada penguatan LAN sebagai institusi pembelajar berkelas dunia melalui pengembangan kompetensi aparatur, kebijakan dan inovasi Administrasi Negara dalam mendukung pembangunan nasional. Perumusan arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan oleh LAN untuk mewujudkan visi dan misi LAN dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional, terutama yang telah digariskan dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional, LAN secara langsung berkontribusi pada agenda pembangunan “Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, sehingga visi LAN juga harus diarahkan pada pencapaian agenda pembangunan tersebut, yaitu untuk memastikan negara terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Secara spesifik, LAN juga merupakan salah satu aktor utama dalam program reformasi birokrasi nasional. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah menetapkan visi reformasi birokrasi untuk “mewujudkan pemerintahan berkelas dunia”. Dengan demikian, LAN juga harus mengarahkan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan visi tersebut.

Dengan mempertimbangkan peran LAN dalam pembangunan nasional dan program reformasi birokrasi nasional, serta mendukung visi RPJMN tahun 2020-2024, visi LAN 2020-2024 merupakan gambaran atas kondisi, posisi, dan peran LAN dalam kedua kerangka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan *World Class Government* Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Untuk mewujudkan visi LAN dan mendukung visi Presiden, LAN melaksanakan misi Presiden dan wakil presiden nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia yaitu.

- 1) Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional
- 2) Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten
- 3) Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi
- 4) Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Beberapa program strategis LAN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (Co-Program bersama BKN dan KASN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Dengan adanya sinergitas ini, diharapkan ASN kelas dunia dapat terwujud khususnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

3.1.4 Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara yang disingkat KASN merupakan lembaga independen yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Visi yang ingin diwujudkan KASN adalah ***“Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”***

Sedangkan misi yang dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut adalah :

- 1) Mengawasi pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas, serta penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN
- 2) Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, profesional dan Akuntabel.

Dengan mengacu pada rencana strategis KASN diketahui bahwa Sistem Merit

dalam Manajemen ASN merupakan pilar utama mewujudkan ASN Kelas Dunia. Untuk itu, BKD Provinsi Riau, dalam merumuskan program dan kegiatan tidak terlepas dari 8 agenda Sistem Merit, yaitu:

- 1) Penerapan aspek perencanaan kebutuhan pegawai
- 2) Penerapan aspek pengadaan pegawai
- 3) Penerapan aspek pengembangan karier dan peningkatan kompetensi pegawai.
- 4) Penerapan aspek promosi, rotasi, dan mutasi
- 5) Penerapan aspek manajemen kinerja pegawai
- 6) Penerapan aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin
- 7) Penerapan aspek perlindungan dan pemberian kemudahan
- 8) Penerapan aspek sistem informasi kepegawaian.

Beberapa program strategis KASN yang dapat diadopsi dan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaan Daerah Provinsi Riau antara lain:

- 1) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (Co-Program bersama BKN dan LAN)
- 2) Program Dukungan Manajemen

3.1.5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud, maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

Mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018. Selanjutnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan menyusun dan menetapkan Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020.

Tim Nasional Pencegahan Korupsi dibentuk untuk menyelenggarakan Stranas PK. Timnas PK terdiri atas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi PK.

Terdapat 3 Fokus Utama dalam Stranas PK yaitu:

- 1) Perizinan dan Tata Niaga
- 2) Keuangan Negara

3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu fokus utama karena akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Manfaat yang akan diperoleh dalam pelaksanaan fokus strategi ini yaitu:

- 1) Berkurangnya Praktik Jual-Beli Jabatan sehingga meningkatkan Kinerja dan manajemen ASN yang profesional
- 2) Pelayanan publik menjadi lebih transparan, cepat, mudah karena berkurangnya gratifikasi
- 3) Pengawasan internal menjadi lebih objektif, independen
- 4) Kelembagaan Pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien anggaran
- 5) Pengambilan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan publik efektif, terpadu, dan aman karena pengambilan keputusan lebih cepat.

Salah satu sub aksi dalam Stranas PK yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Riau adalah Percepatan Sistem Merit. Selama ini, mulai dari hilir ke hulu atau mulai dari penerimaan, mutasi hingga kenaikan jabatan, masih sering ditemukan dilakukan dengan cara yang tertutup. Praktik jual beli jabatan dan ASN yang tidak netral telah menjadi gambaran semua jenjang manajemen kepegawaian. Belum lagi dengan manajemen data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN yang belum dikelola secara terintegrasi. Oleh karenanya, aksi ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua aspek, pertama terciptanya manajemen satu data ASN; kedua, terciptanya manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

Mengingat pentingnya sistem merit sebagai kebijakan nasional dan rencana aksi KPK, maka Pemerintah Provinsi Riau merespon kebijakan dimaksud pada penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui program dan kegiatan yang ada. Ke depannya diharapkan implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN dapat sepenuhnya terlaksana di Provinsi Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 sebagai tindak lanjut dari perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 . Tujuan dan sasaran tersebut efektif diimplementasikan untuk penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2023 dan 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan maupun evaluasi program dan kegiatan. Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Penataan SDM Aparatur		Indeks RB Area 5 Aspek Pemenuhan	2.93	2.95
			Indeks RB Area 5 Aspek Reform	2.10	2.25
		Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	266.14	276.79

Sumber: Perubahan Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Isu Strategis Nasional seperti implementasi Reformasi Birokrasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN, peningkatan pelayanan publik, dan sebagainya
- b. Program strategis Kementerian/Lembaga terkait SDM aparatur
- c. Tema dan fokus prioritas dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD 2023
- d. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah;
- e. Realisasi capaian sampai dengan tahun berjalan
- f. Target Renstra BKD Provinsi Riau sampai Tahun 2024
- g. Penyesuaian terhadap kondisi eksisting seperti adaptasi kebiasaan baru dampak pandemi Covid-19.

Adapun uraian mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Kepegawaian Daerah

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 4) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 5) Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
- 6) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 7) Pengelolaan Data Kepegawaian
- 8) Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

b. Mutasi dan Promosi ASN

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 3) Pengelolaan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

- 1) Pengelolaan Assessment Center
- 2) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- 3) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

- 4) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
- 5) Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
- 6) Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
- 7) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2) Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- 3) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- 4) Pembinaan Disiplin ASN
- 5) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Rencana program dan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas sudah sesuai dengan nominatif program dan kegiatan beserta anggaran dan target kinerja sebagaimana terdapat dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2023. Hal ini sudah sesuai dengan analisis kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan. Apabila terjadi perubahan yang signifikan pada Rancangan Awal RKPD maka akan berdampak pada tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan BKD Provinsi Riau.

Selanjutnya, rumusan rencana Program dan Kegiatan BKD Provinsi Riau Tahun 2023 beserta indikator, target, pagu, serta perkiran maju Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum		100 Persen	23.088.764.030,00			100 Persen	24.026.327.264
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi		1 Laporan	18.190.392.735,00			1 Laporan	18.802.127.264
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1392 Orang/ Bulan	18.190.392.735,00			1416 Orang/ Bulan	18.802.127.264
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi		1 Layanan	-			1 Layanan	62.700.000
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	-			1 Paket	62.700.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		6 Jenis Layanan	1.632.118.322,00			6 Jenis Layanan	1.673.500.000
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	46.045.802,00			1 Paket	35.000.000
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	450.118.674,00			3 Paket	285.000.000
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	158.200.000,00			1 Paket	350.000.000
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	155.827.005,00			1 Paket	248.100.000
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	115.574.841,00			1 Paket	30.400.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	706.352.000,00			1 Laporan	725.000.000
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		4 Jenis	2.931.046.492,00			4 Jenis	3.173.000.000
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	7.000.000,00			1 Laporan	4.000.000
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	785.139.868,00			12 Laporan	799.000.000
5.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	77.560.000,00			1 Laporan	155.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.061.346.624,00			12 Laporan	2.215.000.000
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		4 Jenis	335.206.481,00			4 Jenis	315.000.000
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	41.730.000,00			7 Unit	82.500.000
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13 Unit	104.520.000,00			7 Unit	82.500.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		145 Unit	109.180.000,00			145 Unit	65.000.000
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	79.776.481,00			1 Unit	85.000.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan		100 Persen	8.849.294.905,00			100 Persen	8.963.282.037
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan		100 Persen	1.747.716.007,00			100 Persen	1.529.000.000
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen	62.912.586,00			1 Dokumen	40.000.000
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	807.318.225,00			1 Dokumen	630.000.000
5.03.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 Dokumen	224.999.743,00			1 Dokumen	200.000.000
5.03.02.1.01.06	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 Lembaga	124.999.600,00			1 Lembaga	125.000.000
5.03.02.1.01.08	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		1 Dokumen	94.991.205,00			1 Dokumen	95.500.000
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	249.999.630,00			1 Dokumen	250.000.000
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 Dokumen	42.495.133,00			1 Dokumen	43.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Laporan	139.999.885,00			1 Laporan	145.000.000
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN		100 Persen	1.126.751.663,00			100 Persen	1.065.000.000
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		1 Dokumen	333.271.389,00			1 Dokumen	330.000.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 Laporan	459.575.656,00			2 Laporan	435.000.000
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		1 Dokumen	333.904.618,00			1 Dokumen	300.000.000
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN		100 Persen	5.314.035.194,00			100 Persen	5.720.282.037
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment Center</i>		1 Dokumen	569.154.888,00			1 Dokumen	700.000.000
5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		1 Dokumen	128.519.540,00			1 Dokumen	120.000.000
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		1 Dokumen	2.229.997.330,00			1 Dokumen	2.555.000.000
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		1 Dokumen	767.514.136,00			1 Dokumen	645.000.000
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN		6 Orang	450.856.420,00			6 Orang	691.282.037
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		40 Orang	829.993.367,00			40 Orang	619.000.000
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		1 Dokumen	337.999.513,00			1 Dokumen	390.000.000
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terselesaikan		100 Persen	660.792.041,00			100 Persen	649.000.000
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 Dokumen	106.131.792,00			1 Dokumen	99.500.000
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		20 Orang	95.738.872,00			20 Orang	100.000.000
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		1000 Orang	102.472.636,00			1000 Orang	99.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		80 Orang	236.803.654,00			80 Orang	235.000.000
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		1 Laporan	119.645.087,00			1 Laporan	115.000.000
JUMLAH					31.938.058.935				32.989.609.301

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat teknis operasional, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan daerah Provinsi Riau yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan yang terdiri atas program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 dirumuskan kembali dalam format TC. 33 tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03				KEPEGAWAIAN								31,938,058,935		32,989,609,301				
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								23,088,764,030		24,026,327,264				
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								18,190,392,735		18,802,127,264				
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	116 Orang/ Bulan	100 Persen	18,190,392,735	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	18,802,127,264	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0		62,700,000				
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Terfasilitasi layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Paket	1 Layanan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	62,700,000	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,632,118,322		1,673,500,000				
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	6 Jenis	46,045,802	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	35,000,000	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	6 Jenis	450,118,674	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	285,000,000	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	6 Jenis	158,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	350,000,000	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	6 Jenis	155,827,005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	248,100,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	6 Jenis	115,574,841	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	30,400,000
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	6 Jenis	706,352,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	725,000,000
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,931,046,492	3,173,000,000				
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	4 Jenis	7,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	4,000,000
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	4 Jenis	785,139,868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	799,000,000
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	4 Jenis	77,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	155,000,000
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	4 Jenis	2,061,346,624	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	2,215,000,000
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								335,206,481	315,000,000				
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	4 Jenis	41,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	82,500,000
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	13 Unit	4 Jenis	104,520,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	82,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	145 Unit	4 Jenis	109,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	65,000,000
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	4 Jenis	79,776,481			Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kepegawaian	100 Persen	85,000,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								8,849,294,905				8,963,282,037	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								1,747,716,007				1,529,000,000	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	62,912,586	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	40,000,000
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	807,318,225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	630,000,000
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	224,999,743	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	200,000,000
5	03	02	1.01	08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Lembaga	100 Persen	124,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	125,000,000
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	94,991,205	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	95,500,000
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	249,999,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	250,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	42,495,133	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	43,500,000
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terselesaikannya Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	139,999,885	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	145,000,000
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN								1,126,751,663				1,065,000,000	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Terselesaikannya Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	333,271,389	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	330,000,000
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terselesaikannya Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	459,575,656	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	435,000,000
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Terselesaikannya Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	333,904,618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	300,000,000
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN								5,314,035,194				5,720,282,037	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	569,154,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	700,000,000
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	128,519,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	120,000,000
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,229,997,330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	2,555,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	767,514,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	645,000,000
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Orang	100 Persen	450,856,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	691,282,037
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	40 Orang	100 Persen	829,993,367	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	619,000,000
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengembangan Kompetensi ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	337,999,513	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	390,000,000
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								660,792,041				649,000,000	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terselesaikannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	106,131,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	99,500,000
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Terseleaikannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang	100 Persen	95,738,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	100,000,000
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Terseleaikannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1000 Orang	100 Persen	102,472,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	99,500,000
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Terseleaikannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	80 Orang	100 Persen	236,803,654	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	235,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	119,645,087	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	115,000,000
TOTAL													31,938,058,935			32,989,609,301		

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 ini disusun dengan berkoordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Dengan disusunnya dokumen renja ini diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2023 dapat berjalan secara lebih terarah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau serta tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024.

Demikianlah Renja Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau Tahun 2023 disusun sebagai acuan dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2023.

Pekanbaru, September 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650904 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172 - 848593 – 33073 Fax (0761) (0761) 21172 - 848593 – 33073
E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>
PEKANBARU - RIAU

KEPUTUSAN **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** **PROVINSI RIAU**

Kpts.900/BKD/1.1/XII/2021/1103

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA** **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DAN** **PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH** **PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Perovinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RpjPd) Provinsi Riau Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**


IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650904 199703 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : Kpts.900/BKD/1.1/XII/2021/
Tanggal : 21 Desember 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Ketua Tim	Ikhwan Ridwan, SH., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
2	Sekretaris Tim	T. Faisyal, SE	Sekretaris
	Anggota	Harry Prabowo, S.STP	Perencana Muda - Sub Koordinator Perencanaan Program
	Anggota	Mustika Lyza, S.STP., M.Si	Perencana Muda
	Anggota	Matwiyadi	Perencana Pertama
	Anggota	Nanang Kusnadi, SE	Perencana Pertama
	Anggota	Ira Diana Sari, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota	Satria Nugraha, S.STP	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
	Anggota	Fanny Ramadhani, S.STP	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
3	Kelompok Kerja Sekretariat		
	Koordinator	T. Faisyal, SE	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
	Anggota	Zul Anshari, S.Sos., M.Si	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
	Anggota	Nidya Elvinsari, S.STP., M.Si	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Anggota	Prima Putra, A.Md	Pengelola Program dan Kegiatan
4	Kelompok Kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian		
	Koordinator	Sri Marleni, SE	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian
	Anggota	Delina, SH. MM	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Iis Hermawati, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Ferry Elwind, S.Pi, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
5	Kelompok Kerja Bidang Mutasi		
	Koordinator	Wahyu Qurniawan, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Mutasi
	Anggota	Heri Permana, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
	Anggota	Murina Utri, SP., M.IP	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Wike Kastira, S.IP	Analisis SDM Aparatur Muda
6	Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Aparatur		
	Koordinator	Hj. Fariza, S.H, M.H	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
	Anggota	Andi Husnadi, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Sulastri Nelly Astuti, S.E	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Gunturwitovta Asri, S.STP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
7	Kelompok Kerja Bidang Pendayagunaan Dan Pembinaan		
	Koordinator	T. Hevi Ikhwanasyah , MH	Kepala Bidang Pendayagunaan Dan Pembinaan
	Anggota	M. Muchti N, S.IP, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Didi Yuni Aji, SH	Analisis SDM Aparatur Muda
	Anggota	Fitriana, SE, M.Si	Analisis SDM Aparatur Muda
8	Kelompok Kerja Penilaian Kompetensi		
	Koordinator	Budi Fakhri, S.Psi	Kepala UPT. Penilaian Kompetensi
	Anggota	Iqbal Lesmana Putra, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt. Penilaian Kompetensi
	Anggota	Jeffri Firdaus Arief, SE	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
	Anggota	Indra Rosadi, S.Pdi., M.Si	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650904 199703 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau
Nomor : Kpts.900/BKD/1.1/XII/2021/
Tanggal : 31 Desember 2021

AGENDA KERJA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022

NO	AGENDA	JADWAL
1	2	3
RENCANA KERJA TAHUN 2023		
1	Persiapan Penyusunan Renja	Desember 2021
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja	Desember 2021
3	Penyusunan Rancangan Renja	Januari 2022
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Februari 2022
5	Penyempurnaan Rancangan Renja	Maret 2022
6	Perumusan Rancangan Akhir Renja	Mei 2022
7	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juni 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022		
1	Persiapan Penyusunan Perubahan Renja	Juni 2022
2	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah	Juli 2022
3	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Agustus 2022

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650904 199703 1 001

FORM VERIFIKASI DOKUMEN
RANCANGAN AKHIR RENJA PD TAHUN 2023

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
1	COVER	JUDUL COVER : “RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat daerah masing-masing)		v	Bacaan Rancangan akhirnya dihapuskan disesuaikan dengan judul dalam form verifikasi
2	PERGUB PENETAPAN	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2023	-		
3	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	v		
4	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	v		
5	BAB I PENDAHULUAN				
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	v		
	1.2. Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	v		
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	v		
	1.4. Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	v		
6	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021				

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Menggunakan Tabel T-C.29	v		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK Menggunakan Tabel T-C.30	v		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	v		
	2.4. Review terhadap RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak	v		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		terdapat pada RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda; Menggunakan Tabel T-C.31			
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Menggunakan Tabel T-C.32	v		
7	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	v		
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah			
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Menggunakan Tabel T-C.33	v		
8	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
		Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> Penetapan - Penetapan RKPD 2023.	v		
9	BAB V PENUTUP				
		1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2.Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3.Rencana tindak lanjut. 4.Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan	v		

NO	SUSUNAN	URAIAN	SESUAI	TIDAK SESUAI	CATATAN VERIFIKASI
		kepala Perangkat Daerah , serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.			
10	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja PD pada tahapan sebelumnya.			Menyusul

Pekanbaru, September 2022

Verifikator :

Kepala Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bappedalitbang Provinsi Riau

HERI YANTO, S.Hut., MT
NIP. 197111126 199803 1 006

Fungsional Perencana Ahli Madya

DESNIRIZA, SH, M.Si
NIP. 19721209 199803 2 003

Sekretaris
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau

T. FAISYAL, SE
NIP. 19700325 199703 1 004

Fungsional Perencana Ahli Muda

MUSTIKA LYZA, S.STP, M.SI
NIP. 19830809 200112 2 002

Sub Koordinator Perencanaan dan Program
Fungsional Perencana Ahli Muda



HARRY PRABOWO, S.STP
NIP. 19860308 200412 1 001

Sub Koordinator Pemerintahan Pemberdayaan
Masyarakat Ketenagakerjaan dan Transnigrasi
Fungsional Perencana Ahli Muda

ARI DIANUARI
NIP. 19810103 200902 1 002